

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2024**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKJIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2024 telah terlaksanan.

Dokumen LKJIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2024 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga Dokumen LKJIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Sekretariat Daerah serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Sekretariat Daerah).

Selain itu, Dokumen LKJIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Perjanjian Kinerja, sehingga Dokumen LKJIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan Rencana Strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dengan tersusunya dokumen ini, diucapkan terimah kasih kepada tim penyusun LKJIP Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

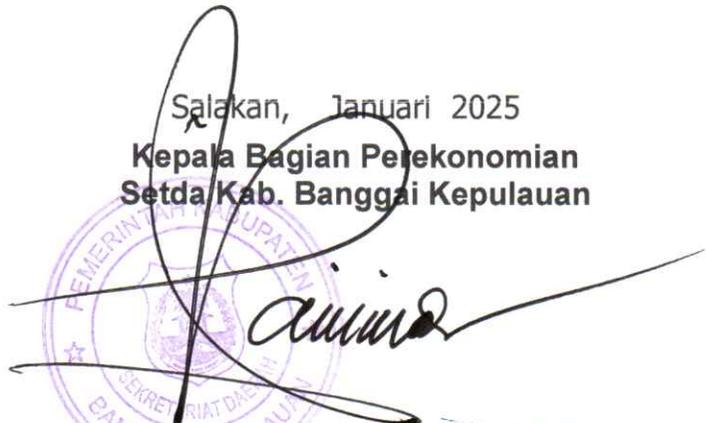
Harapan kita semua tentunya penyusunan LKJIP Bagian Perekonomian Tahun 2024 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan Langkah dan kebijakan Sekretariat Daerah di Tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara Pemerintah Daerah

dalam mewujudkan visi-misi Sekretariat Daerah dan visi-misi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Diharapkan dengan tersusunnya LKJIP ini dapat di jadikan alat perbandingan dalam pelaksanaan kegiatan kinerja Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan untuk tahun mendatang agar menjadi lebih baik lagi.

Salakan, Januari 2025

**Kepala Bagian Perekonomian  
Setda Kab. Banggai Kepulauan**



**PAISAL PAHIL MUHAMMAD, S.Sos**  
**NIP. 19750325 2005 1 004**

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Gambaran Umum .....	1
1.2 Dasar Hukum.....	1
1.3 Tugas Pokok .....	3
1. Fungsi dan Tugas Bagian Perekonomian Setda Kab.Banggai Kepulauan .....	4
a) Fungsi Bagian Perekonomian .....	4
b) Tugas bagian Perekonomian .....	4
c) Struktur Organisasi Bagian Perekonomian Setda Kab. Banggai Kepulauan..	7
1.4 Potensi Sumber Daya .....	8
a) Sumber Daya Aparatur .....	8
b) Rekapitulasi PNS Menurut Golongan/Ruangan .....	9
c) Posisi pegawai menurut jabatan.....	9
d) Saran dan prasarana .....	9
e) Jumlah Surat Masuk/Keluar .....	12
1.5 Sistematika Penyajian .....	12
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>14</b>
2.1 Pernyataan Visi dan Misi .....	14
- Pernyataan Visi.....	14
- Pernyataan Misi .....	15
2.2 Tujuan dan Stratejik .....	15
- Sasaran dan Program 2024-2026 .....	17
2.3 Penetapan Indikator Kinerja Utama(IKU).....	17
2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 .....	19

<b>BAB III PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>20</b>
3.1 Capaian Kinerja Bagian Perekonomian.....	20
3.2 Analisis Efisiensi Pengguna Sumber Daya .....	33
3.3 Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2024 .....	36
3.4 Realisasi Anggaran .....	37
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>39</b>
Kesimpulan dan Saran.....	39
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran .....	40
C. Lampiran	

**IKTHISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 menyajikan semua capaian kinerja dari semua capaian dan kegiatan selama Tahun 2024. Penilaian capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target atau rencana dalam Renja Tahun 2024 dengan realisasinya.

Untuk penyusunannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 ini, penilaian capaian kinerja ditekankan **Kepada Pencapaian Kinerja Sasaran**. Adapun pencapaian kinerja kegiatan (indicator kinerja, input, outcome) akan diselaraskan dengan pencapaian kinerja sasarnya.

Sesuai dengan rencana kinerja 2024, selama Tahun 2024 Bagian Perekonomian melaksanakan kegiatan dalam Program untuk memenuhi sasaran strategik. Untuk melaksanakan semua kegiatan ini disediakan anggaran sebesar **Rp. 1.140.000.000** Capaian kinerja selama Tahun 2024 menunjukkan bahwa Bagian Perekonomian Setda Kab. Banggai Kepulauan telah berhasil memenuhi sasaran strategik.

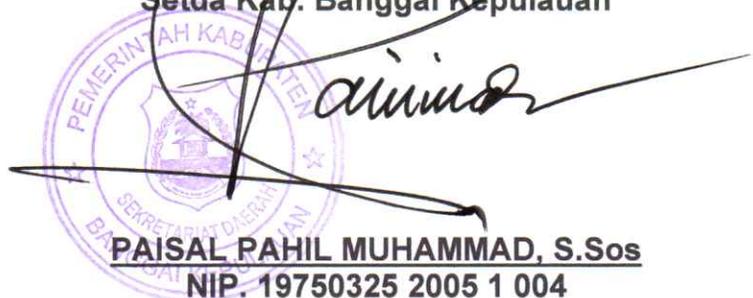
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perekonomian dan Pembangunan

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi mandiri, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan pada umumnya telah selaras dengan Renstra Bagian Perekonomian dengan nilai capai **99,56%**

Dihapkan dengan tersusunya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini dapat dijadikan alat perbandingan dalam pelaksanaan kegiatan dan kinerja Bagian Perekonomian untuk tahun mendatang lebih baik.

Salakan, Januari 2024

**Kepala Bagian Perekonomian  
Setda Kab. Banggai Kepulauan**



**PAISAL PAHIL MUHAMMAD, S.Sos**  
NIP. 19750325 2005 1 004

## Bab 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum

Maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Perekonomian dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu kesimpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan di tahun-tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mencakup realisasi pelaksanaan kegiatan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahun 2024.

### 1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Perekonomian adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang System Informasi Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan No 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 80, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan. (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 36);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);

### 1.3 Tugas Pokok

Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan. (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 36):

***Membantu melaksanakan Pengordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.***

## 1. Tugas dan Fungsi Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan

### a. Fungsi Bagian Perekonomian

- a) Penyiapan bahan pengorganisasian perumusan kebijakan Daerah dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
- b) Penyiapan bahan pengorganisasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
- c) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten perekonomian dan pembangunan yang diberkaitan dengan tugasnya ; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### b. Tugas Bagian Perekonomian

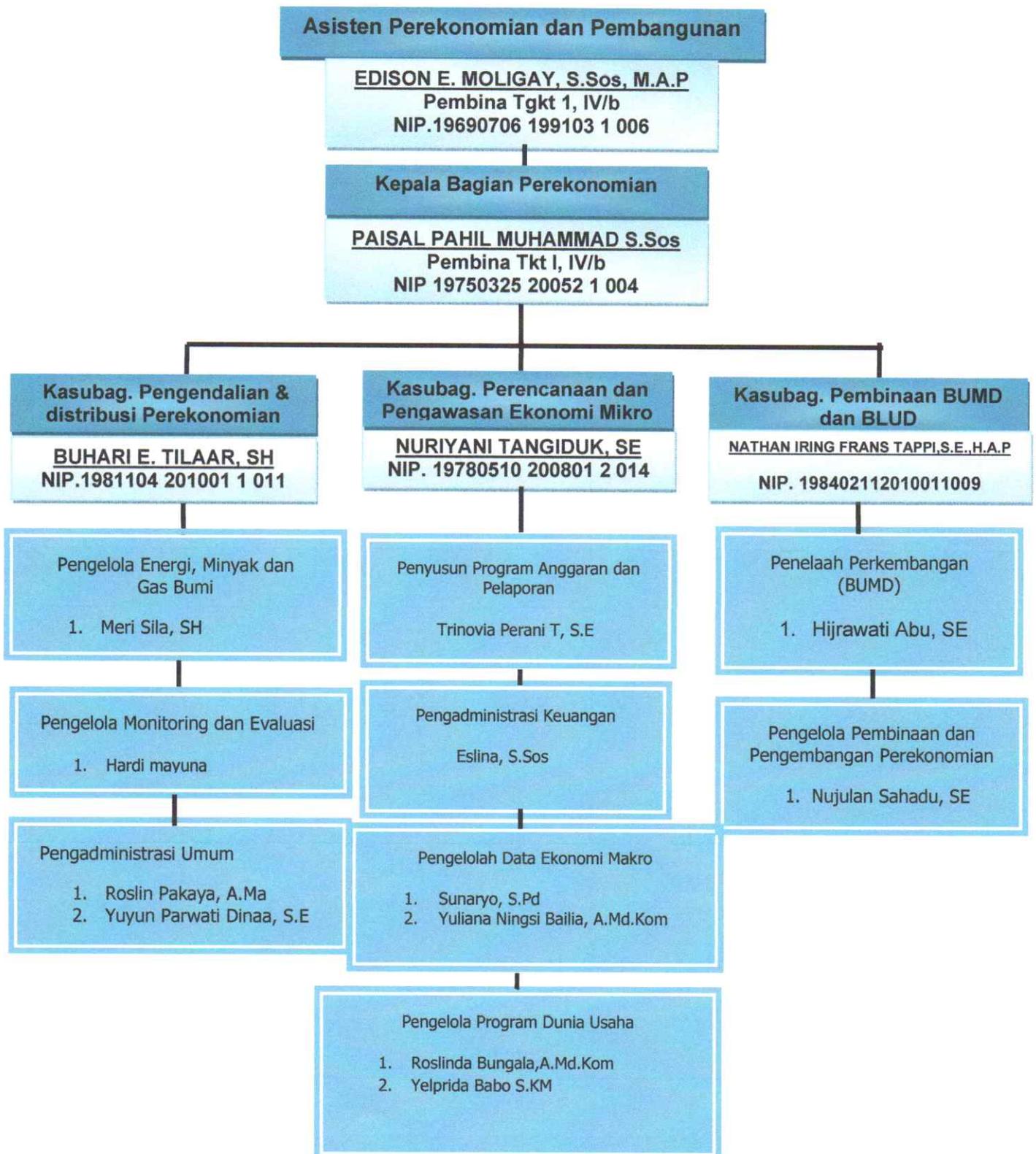
Didalam melakukan tugasnya masing-masing, Struktur organisasi Bagian Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang membawahi 3 (tiga sub bagian) dan mempunyai tugas masing-masing Sub. Bagian yaitu :

- a) Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi perekonomian mempunyai tugas :
  - Melaksanakan pengelolaan administrai dan menyusun rencana kegiatan;
  - Menyusun bahan dan data serta analisa dibidang Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;

- Menyusun bahan perumusan kebijakan dibidang pengendalian dan distribusi perekonomian;
  - Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian;
  - Menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
  - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dibidang Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
  - Memfasilitasi dan pembinaan dibidang Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
  - Memfasilitasi kebijakan penetapan harga, harga eceran tertinggi bahan bakar minyak dan LPG ;
  - Memfasilitasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi ; dan
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
- b) Sub Bagian Perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro kecil mempunyai tugas :
- Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan;
  - Menyusun bahan dan data serta analisa dibidang perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
  - Menyusun bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
  - Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
  - Menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;

- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dibidang perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
  - Memfasilitasi dan pembinaan dibidang perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
  - Melaksanakan dan memfasilitasi pemantauan dan pengendalian Inflasi Daerah;
  - Melaksanakan koordinasi kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi program kredit usaha Program; dan
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
- c) Sub bagian pembinaan BUMD dan BLUD mempunyai tugas.
- Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan;
  - Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
  - Menyiapkan Bahan pembinaan pengelolaan badan usaha milik Daerah dan badan layanan umum Daerah;
  - Melakukan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
  - Melakukan monitoring dan Evaluasi Badan Usaha milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; dan
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

## STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



#### 1.4 Potensi Sumber Daya

##### a) Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan didukung oleh sejumlah sumber daya aparatur yang masih terbatas, hal ini dapat dilihat dari jumlah PNS dan Non PNS. Dari jumlah tersebut, berdasarkan tingkat pendidikan sumber daya PNS yang berpendidikan S1 sebanyak 3 orang, S2 1 Orang, DII Sebanyak 1 Orang, D3 sebanyak 2 orang, SMA sebanyak 1 orang, dan tingkat pendidikan sumber daya Non PNS yang berpendidikan S1 sebanyak 8 orang, Untuk lebih jelasnya sumber daya aparatur Bagian perekonomian berdasarkan tingkat pendidikan yang tersusun dengan kriteria gender dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 1 PNS**

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH LAKI-LAKI / PEREMPUAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	S2	1	-	1
2.	S1	2	1	3
2.	D.III	-	2	2
3.	D.II	-	1	1
3.	SMA	1	-	1
Jumlah		4	4	8

**Tabel 2 NON PNS**

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH LAKI-LAKI / PEREMPUAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	S1	2	6	8
2	D.III	-	-	-
3	SMA	-	-	-
Jumlah		2	6	8

## b) Rekapitulasi PNS Menurut Golongan/Ruangan

No	Golongan	Ruang					Jumlah
		A	B	C	D	E	
1	Golongan IV	-	1	-	-	-	1
2	Golongan III	-	1	-	3	-	4
3	Golongan II	-	-	3	-	-	3

## c) Posisi pegawai menurut jabatan

Pegawai	Posisi per 02/01/2024	Tambah	Kurang	Posisi per 31/12/2024
Pejabat Struktural	4	-	-	4
Pejabat Fungsional	-	-	-	-
Pegawai Administrasi	3	-	-	3
Jumlah	7	-	-	7

## d) Sarana dan prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, di Bagian Perekonomian Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat beberapa fasilitas sarana dan prasarana antara lain :

No	Nama Bahan/Alat	Jenis/Type	Jumlah Pengadaan Tahun 2016-2024	Ket
1	P.c Unit/Komputer	HP/Pavilion r002	2 Unit	Pengadaan 2016
2	Lap Top	Dell, Inspiron, 145447Core i7	2 Buah	Pengadaan 2016
3	Printer	Epson L360	2 Buah	Pengadaan 2016
4	Peralatan Personal Komputer Lain-Lain	Deepcool/Cooler Wind Pall	2 Buah	Pengadaan 2016
5	Harddisk Eksternal	Seagate/ekspansion	2 Buah	Pengadaan 2016
6	DVD-Rom Drive	Dell External/Gp60N	2 Buah	Pengadaan 2016

7	Mause	Votre/Mouse Optic	2 Buah	Pengadaan 2016
8	Mause	Surface/Mouse Pad gaming	2 Buah	Pengadaan 2016
9	Memory	Sony/sdhc 16 GB/70MBPS Class 10	1 Buah	Pengadaan 2016
10	Meja kerja Eselon III	Melody/Meja Biro Eselon III	1 Buah	Pengadaan 2016
11	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Alvero/Kursi Sandar Tinggi	1 Buah	Pengadaan 2016
12	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Alvero/Kursi Sandar Pendek	6 Buah	Pengadaan 2016
13	Buffet Kayu	/Buffet 4 Pintu	1 Buah	Pengadaan 2016
14	Peralatan Studio Vidio dan Filem Lain-Lain	/Tas Kamera	1 Buah	Pengadaan 2016
15	Camera Elektronik	Soni/Cybershot	1 Buah	Pengadaan 2016
16	Lap Top	Acer/ Aspire E5-475	1 Buah	Pengadaan 2017
17	Meja Biro	Pro design/Meja Biro Olympic	1 Buah	Hibah 2016
18	Kursi Lipat	Cithose/kursi Staf	8 Buah	Hibah 2016
19	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Polaris /-	1 Buah	Hibah 2016
20	AC Unit	Sharp /-	1 Buah	Hibah 2016
21	AC Split	Polytron /-	1 Buah	Hibah 2016
22	Meja Kerja	Melody/ Meja Komputer	1 Buah	Hibah 2016
23	Lemari Arsip	Oggi/OG.414.A/3 pintu	1 Buah	Hibah 2016
24	Station Wagon	Toyota /New Avanza Velos	1 Unit	Mutasi Barang 2018
25	Printer	Epson/L3100 Series Model C634D	1 Unit	Pengadaan 2019
26	Hardisk Eksternal	Toshiba/DTB410	2 Unit	Pengadaan 2019
27	Scanner	Epson	1 Unit	Pengadaan 2019

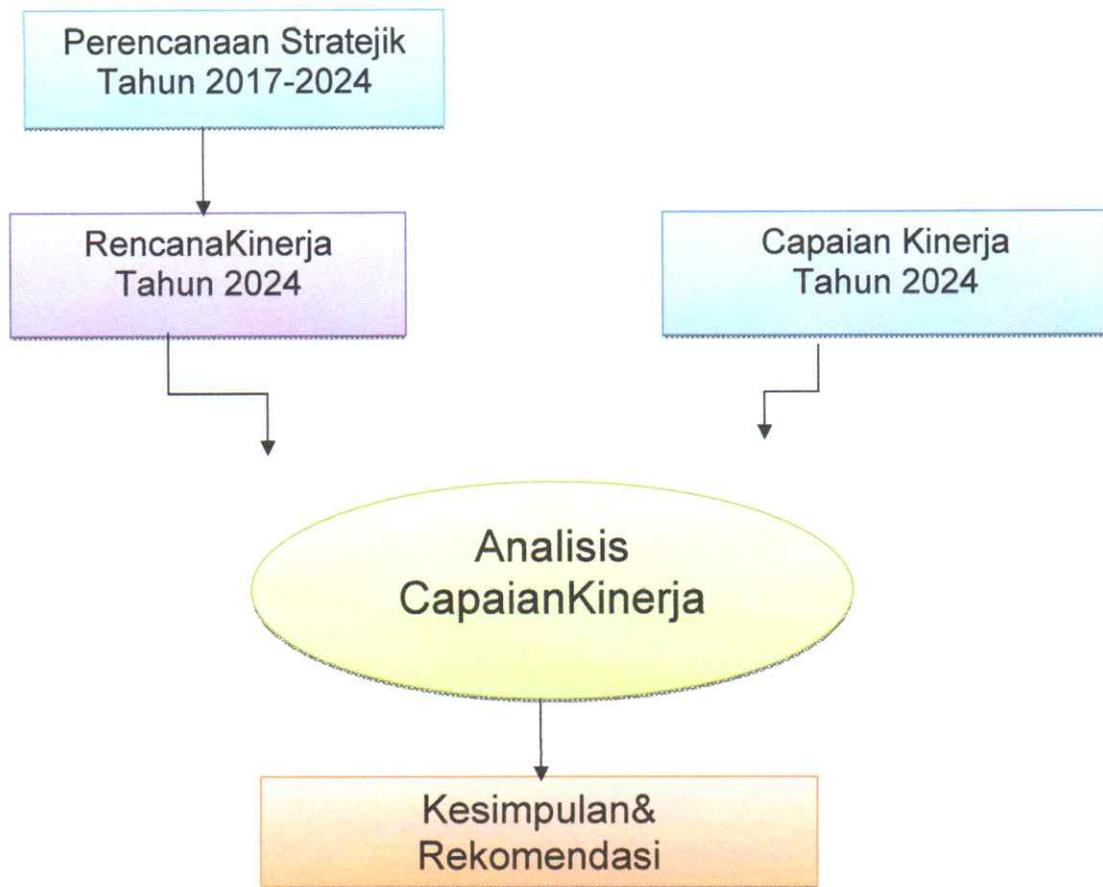
28	Motor	Yamaha	3 Unit	Pengadaan 2019
29	Laptop	Aser/Aspire A514-54G	1 Unit	Pengadaan 2021
30	Lap Top	Asus Vivobo OK A416EPO -VIPS754 (GRAY)	2 Buah	Pengadaan 2022
31	Lap Top	Lenovo Laptop-FORIJTHK	1 Buah	Pengadaan 2022
32	Lap Top	Lenovo Laptop-JPRM88C9	1 Buah	Pengadaan 2022
33	Lap Top	HP/14s-dq5002TU	2 Buah	Pengadaan 2023
34	Printer	EPSON L3250	3 Buah	Pengadaan 2023
35	Proyektor	Sonic	1 Buah	Pengadaan 2023
36	Scanner	Epson Genune APP(Call Center 1-500-766)	1 Buah	Pengadaan 2023
37	Hardiks	Seagate	1 Buah	Pengadaan 2023
38	AC	Daikin/Rp25AV15	3 Buah	Pengadaan 2023
39	Leptop	Lenovo Ideapad Slim 3 15 IAU7 1255	3 Buah	Pengadaan 2024
40	Printer	Epson L3550 Serial	2 Buah	Pengadaan 2024
41	Komputer	HP AIO 24 15 1135G7 8GB 512 GB W11+OHS 23.8 FHD IPS WHT S/N 8CC334 1D2S	2 Buah	Pengadaan 2024
<b>JUMLAH</b>			<b>67 Buah</b>	

## e) Jumlah Surat Masuk/Keluar

No	Bulan	Jumlah Surat		Jumlah Surat
		Masuk	Keluar	Masuk & Keluar
1	Januari	27	35	62
2	Februari	12	12	24
3	Maret	9	4	13
4	April	13	21	34
5	Mei	10	8	18
6	Juni	12	7	19
7	Juli	21	23	44
8	Agustus	18	11	29
9	September	16	8	24
10	Oktober	24	22	46
11	November	15	8	23
12	Desember	10	12	22
Jumlah		187	171	358

### 1.5 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini dapat mengkonsumsi pencapaian kinerja Bagian Perekonomian selama tahun 2024. Capaian kinerja untuk tahun 2024 dapat diperbandingkan dengan rencana kinerja tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis dan Capaian Kinerja terhadap kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah kinerja bagi perbaikan dimasa yang akan datang. maka dengan pola pikir tersebut, sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja Bagian Perekonomian tahun 2024 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut:



## Bab 2

## PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan Janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.

Perjanjian Kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan dalam suatu tahun tertentu Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategik tahun 2024 diatas, Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan menentukan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Target ini dijalankan dalam Dokumen Rencana Kinerja tahun 2024.

### 2.1 Pernyataan Visi dan Misi

#### ***Pernyataan Visi***

Visi untuk Bagian Perekonomian secara keseluruhan mendukung visi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu :

***“Melaksanakan dan Mengkoordinasikan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pembinaan Serta Pengendalian Perekonomian ”***

Pernyataan Bagian Perekonomian Setda Kab.Banggai Kepulauan pada dasarnya mengacu pada pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menunjang visi Bagian Perekonomian Setda Kab. Banggai Kepulauan maka disusunlah operasional visi Bagian Perekonomian sebagai berikut :

a. Melaksanakan dan Mengkoordinasikan

Dalam melaksanakan kegiatan Perekonomian selalu mengacu dalam berkoordinasi dengan pedoman yang sudah ditentukan.

b. Petunjuk Teknis Pembinaan

Kegiatan Perekonomian harus terarah, terencana dan berhasil guna berdasarkan petunjuk teknis yang sudah ditentukan.

c. Pengendalian Perekonomian

Pada setiap akhir kegiatan Perekonomian selalu dievaluasi, dianalisis hasil laporan menyangkut hambatan dan kendala dilapangan.

Terwujudnya visi yang diuraikan merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh staf pada Bagian Perekonomian sebagai upaya nyata visi tersebut, maka dibuatlah misi Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan menunjukkan kebutuhan apa yang akan dipenuhi oleh organisasi.

## ***Pernyataan Misi***

---

Untuk Mewujudkan Misi tersebut diatas Bagian Perekonomian mempunyai tiga Misi sebagai berikut :

1. Mengumpulkan bahan-bahan dan mengkoordinasikan penyusunan program Perekonomian daerah,-
2. Mengumpulkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan perekonomian dan pengendalian,-
3. Mengumpulkan bahan-bahan melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan perekonomian serta menyiapkan penyusunan program

## ***2.2 Tujuan dan stratejik***

---

Tujuan stratejik merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu satu tahun sampai lima tahun dengan diformulasikannya tujuan stratejik ini maka secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam

memenuhi visi misinya untuk kurun waktu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Adapun tujuan strategik dari Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi yang akuntabel dan mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender;
2. Menekan Laju Inflasi;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Meningkatkan kinerja BUMD dan UMKM dan Koperasi;
5. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui koordinasi dan evaluasi dengan SKPD terkait;
6. Pengentasan kemiskinan melalui evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan bidang ekonomi;
7. Peningkatan koordinasi dan evaluasi kestabilan harga bahan pokok;
8. Peningkatan pameran produksi daerah melalui SKPD terkait;
9. Pengawasan penyaluran bantuan modal untuk pengusaha melalui koordinasi dengan SKPD terkait;
10. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha melalui koordinasi dengan SKPD terkait.
11. Peningkatan Pengawasan Penyaluran BBM bersubsidi.
12. Meningkatkan Pembinaan BUMD

## Sasaran dan Program 2024-2026

---

Sasaran strategik Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan adalah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang sudah ditetapkan, yang telah menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun.

Sasaran Strategik Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik dan merupakan dasar kuat untuk dapat mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta dapat menjamin sukses tidaknya pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Selanjutnya pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Sekretariat Daerah pada periode 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi Penyusunan Angka Inflasi;
2. Terwujudnya Fasilitasi Pembinaan, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
3. Terwujudnya Koordinasi dan Monitoring Stabilitas Harga Bahan Pokok, dan Bahan Strategis Lainnya;
4. Terwujudnya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi dan LPG;
5. Terwujudnya pengendalian tingkat inflasi;
6. Terwujudnya penguatan TPID Kabupaten;
7. Pelaksanaan Sosialisasi KUR;
8. Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian BUMD;

### 2.3 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran strategis ditetapkan untuk merinci lebih lanjut sekaligus mendukung setiap tujuan strategis Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan. Keberhasilan pencapaian sasaran harus sepenuhnya mengacu pada upaya pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan disini, sasaran-sasaran ditetapkan untuk periode tahunan yang secara paralel maupun sekuensial akan mendukung pencapaian tujuan strategis. Keberhasilan pencapaian sasaran perlu diukur dan dilaporkan setiap tahun. Oleh karena itu, untuk setiap sasaran yang ada perlu ditetapkan indikator kerjanya. Indikator kinerja

tersebut akan sangat berguna pada saat melakukan pengukuran kinerja dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan sasaran yang telah ditetapkan.

Berikut ini dijabarkan indikator kinerja untuk seluruh sasaran strategis Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan dan periode pencapaian masing-masing sasaran tersebut. Disini, periode pencapaian sasaran adalah tahun dimana program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang bersangkutan dilakukan.

**Tabel 2.1**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**  
**Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan**

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
1	2	3
1	Fasilitasi Penyusunan Angka Inflasi	Tersedianya Angka Inflasi setiap bulan dan Laporan Angka Inflasi Tahunan (Jumlah Dokumen yang dihasilkan)
2	Terwujudnya Fasilitasi Pembinaan, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Pembinaan, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan), Peningkatan Percepatan Penyerapan Dana KUR dan Peningkatan SDM (Jumlah kegiatan yang dilaksanakan) dan tersusunnya Laporan Kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah
3	Terwujudnya Koordinasi dan Monitoring Stabilitas Harga Bahan Pokok, dan Bahan Strategis Lainnya	TPID (Jumlah Laporan Stabilitas Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis lainnya)
4	Terwujudnya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi dan LPG	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi dan LPG (Jumlah Laporan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi dan LPG)
5	Terwujudnya pengendalian tingkat inflasi	TPID Jumlah Laporan Pengendalian inflasi daerah yang dilaporkan
6	Pelaksanaan Sosialisasi KUR	Peningkatan Percepatan Penyerapan Dana KUR dan Peningkatan SDM (Jumlah kegiatan yang dilaksanakan)
7	Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian BUMD	Terwujudnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian BUMD (Jumlah BUMD)

## 2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Pada awal tahun setelah penetapan anggaran tahun 2024 Bagian Perekonomian Kabupaten Banggai Kepulauan telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan Baik sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat dan daya dukung lingkungan serta berdasarkan pada perencanaan strategis tahun 2024-2026

Perjanjian Kinerja ini dijadikan tolok ukur untuk pengukuran capaian kinerja Tahun 2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
1	2	3	5
1	Fasilitasi Penyusunan Angka Inflasi	Tersedianya Angka Inflasi setiap bulan dan Laporan Angka Inflasi Tahunan (Jumlah Dokumen yang dihasilkan)	12 Dokumen
2	Terwujudnya Fasilitasi Pembinaan, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Pembinaan, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan) Peningkatan Percepatan Penyerapan Dana KUR dan Peningkatan SDM (Jumlah kegiatan yang dilaksanakan) dan tersusunnya Laporan Kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	13 Laporan
3	Terwujudnya Koordinasi dan Monitoring Stabilitas Harga Bahan Pokok, dan Bahan Strategis Lainnya	TPID (Jumlah Laporan Stabilitas Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis lainnya)	12 Laporan
4	Terwujudnya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi dan LPG	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi dan LPG (Jumlah Laporan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi dan LPG)	4 Laporan
5	Terwujudnya pengendalian tingkat inflasi	TPID Jumlah Laporan Kegiatan Pengendalian inflasi daerah yang dilaporkan	4 Laporan
6	Pelaksanaan Sosialisasi KUR	Peningkatan Percepatan Penyerapan Dana KUR dan Peningkatan SDM (Jumlah kegiatan yang dilaksanakan)	1 Kegiatan
7	Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian BUMD	Terwujudnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian BUMD (Jumlah BUMD)	4 Dokumen

**Bab 3****AKUNTABILITAS KINERJA****3.1 Capaian Kinerja Bagian Perekonomian**

Akuntabilitas kinerja Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strateginya yang dituangkan dalam Rencana Strategi (Renstra).

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/ program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan. Untuk mengetahui capaian kinerja Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Fasilitasi Penyusunan Angka Inflasi	Tersedianya Angka Inflasi setiap bulan dan Laporan Angka Inflasi Tahunan (Jumlah Dokumen yang dihasilkan)	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2.	Terwujudnya Fasilitasi Pembinaan, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Pembinaan, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan) Peningkatan Percepatan Penyerapan Dana KUR dan Peningkatan SDM (Jumlah kegiatan yang dilaksanakan) dan tersusunnya Laporan Kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	13 Laporan	13 Laporan	100%

3.	Terwujudnya Koordinasi dan Monitoring Stabilitas Harga Bahan Pokok, dan Bahan Strategis Lainnya	TPID (Jumlah Laporan Stabilitas Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis lainnya)	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.	Terwujudnya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi dan LPG	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi dan LPG (Jumlah Laporan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi dan LPG)	4 Laporan	4 Laporan	100%
5.	Terwujudnya pengendalian tingkat inflasi	TPID Jumlah Laporan Pengendalian inflasi daerah yang dilaporkan	4 Laporan	4 Laporan	100%
6.	Pelaksanaan Sosialisasi KUR	Peningkatan Percepatan Penyerapan Dana KUR dan Peningkatan SDM (Jumlah kegiatan yang dilaksanakan)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
7.	Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian BUMD	Terwujudnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian BUMD (Jumlah BUMD)	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa:

1. Berdasarkan Tabel diatas, Capaian realisasi Fasilitasi Penyusunan Angka Inflasi dan Terwujudnya pengendalian tingkat inflasi pada Tahun 2024 sebanyak 12 Dokumen atau 100 % dari target yang telah ditetapkan sebanyak 12 dokumen.
2. Terwujudnya Fasilitasi Pembinaan, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil pada tahun 2024 sebanyak 13 Laporan atau 100% dari 13 Laporan yang di targetkan
3. Terwujudnya Koordinasi dan Monitoring Stabilitas Harga Bahan Pokok, dan Bahan Strategis Lainnya pada tahun 2024 sebanyak 12 Laporan atau 100% dari 12 Laporan yang di targetkan.
4. Terwujudnya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi dan LPG pada Tahun 2024 sebanyak 4 Laporan atau 100% dari 4 Laporan yang ditargetkan.

5. Terwujudnya pengendalian tingkat inflasi pada Tahun 2024 sebanyak 4 Laporan atau 100% dari 4 Laporan yang ditargetkan.
6. Pelaksanaan Sosialisasi KUR pada Tahun 2024 sebanyak 1 Kegiatan atau 100% dari 1 Kegiatan yang ditargetkan
7. Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian BUMD pada Tahun 2024 sebanyak 3 dokumen atau 100% dari 3 dokumen yang ditargetkan

Dalam usaha mengkoordinasikan pelaksanaan tugas koordinasi dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan beberapa langkah sebagai berikut :

- Pengendalian Inflasi Daerah

Pengendalian Inflasi Daerah dilakukan dengan cara monitoring harga bahan pokok. dan diharapkan kedepannya jika ditemukan adanya harga bahan pokok yang melewati Harga Eceran Tertinggi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, akan dilakukan upaya pengendalian sehingga naiknya bahan pokok tersebut tidak terlanjur membuat harga-harga bahan pokok maupun bahan lain meningkat sehingga akan memicu tumbuhnya inflasi menjadi lebih tinggi. Adapun usaha-usaha pengendalian inflasi di Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Keterangan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Rapat Koordinasi Tim TPID		Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan	Melakukan Rapat Koordinasi setiap triwulan dan Hari besar Keagamaan (HBKN)	Anggota TPID
2	Melakukan Pemantauan Harga	Setiap Minggu dan Bulan	Pasar dan Toko Wilayah Kota Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan	Pemantauan Harga Sembilan Bahan Pokok dan Bahan Strategis lainnya	Anggota TPID Bagian Perekonomian
3	Melakukan Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Bahan Pangan Pokok Penanganan Inflasi Pada Daerah Rawan Pangan	Januari s/d 16 Desember 2024	Tersebar di 34 Desa 9 Kecamatan Daerah rawan Pangan yang Berada di Kab. Banggai Kepulauan	Jenis dan jumlah barang yang di salurkan yaitu berupa beras, Minyak Goreng dan Gula	Anggota TPID Dinas Katchewan Pangan

4	A	Pengadaan Jaring Tancap	Tersebar di 24 Desa	Jumlah Penerima Pengadaan Keramba Jaring Tancap Sebanyak 24 Kelompok	Anggota TPID Dinas Perikanan
	B	Pengadaan Mesin Pengasapan	Tersebar di 5 Desa 5 Kecamatan	Jumlah Penerima Pengadaan mesin Pengasapan ikan 1 unit /Perkelompok	Anggota TPID Dinas Perikanan
	C	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		► Pengadaan Bubu 600 Buah ► Pengadaan Gilnet 360 Pcs	Anggota TPID Dinas Perikanan
5		Pencanangan Gerakan Tanam Cabe	Kebun Demplot Dinas Ketahanan Pangan	Tim Pengendalian Inflasi Daerah melaksanakan kegiatan Pencanangan gerakan tanam cabe pada Kebun Demplot Dinas Ketahanan Pangan, kerja sama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kegiatan tersebut dicanangkan oleh Plt. Bupati Banggai Kepulauan. Adapun Maksud dan Tujuan Kegiatan tersebut adalah : a. Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan secara optimal b. Menanggulani lonjakan harga cabe mencukupi kebutuhan pangan dan gizi keluarga yang aman dari pekarangan	Dinas Ketahanan Pangan sebagai Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah
6		Kegiatan	Kecamatan Buko	Dalam rangka	Bagian sebagai

	Pembinaan Pelaku usaha Mikro kecil di Kabupaten Banggai Kepulauan			pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil (UMK), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UMKK. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKK mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan akses pada sumber pembiayaan</li> <li>- Pengembangan kewirausahaan</li> <li>- Peningkatan pasar produk UMKK</li> <li>- Reformasi regulasi UMKK</li> </ul>	Anggota TPID Bagian Perekonomian
7	Pasar Murah	09 Maret s/d 27 Desember 2024	Tersebar di 12 Kecamatan dan terpusat di 20 Titik Lokasi Desa Kab.Banggai Kepulauan	Dengan Komoditas Beras, Gula Pasir, Terigu , Mentega, Kopi, Minyak Kunci Mas, Telur, Bawang Merah ,Bawang Putih ,Cap Daun.	Disperindagkop dan UKM Anggota TP-PKK Kab. Banggai Kepulauan, Dinas Ketahanan Pangan sebagai Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah
8	Melakukan Perhitungan Angka Inflasi	Setiap Bulan	Kabupaten Banggai Kepulauan		Tim Teknis Perhitungan Angka Inflasi (BPS kerja sama dengan Bagian Perekonomian Setda)
10	Melaksanakan Kerjasama antar Daerah antara		Di Luwuk	1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten	

	Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Laut		Di Morowali	Bangi dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 340/39/Kesber/Bag.Kerjasama Nomor : 01/MoU/2023 tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengendalian Inflasi daerah 2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Pemerintah Kabupaten Morowali Nomor : 03/MoU/2023 Nomor :419/0920/Umum/IX/2023 tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengendalian Inflasi daerah	
--	---	--	-------------	---	--

Adapun permasalahan yang ditemui dalam mewujudkan sasaran Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Anggaran yang masih sangat terbatas dalam mempercepat pembangunan infrastruktur
2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang upaya pengendalian inflasi daerah
3. Masih rendahnya Kesadaran OPD Tenis dalam Melaporkan Kegiatan Pengendalian Inflasi KeTim Sekretariat TPID.

4. Belum adanya payung hukum yang jelas terkait stabilitas harga melalui penyusunan anggaran.
5. Dalam hal Pembinaan BUMD perlu memiliki cukup anggaran untuk mendatangkan tenaga ahli yang bisa memberikan pelatihan tentang pengelolaan perusda yang sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, kerja sama, pelaporan dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

Namun, bila pencapaian Realisasi Kinerja Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024, diukur dengan predikat nilai capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- a. 85 % s/d 100 % > = Sangat berhasil,
- b. 70 % s/d < 85 % = Berhasil,
- c. 55 % s/d < 70 % = Cukup Berhasil,
- d. < 55 % = Tidak Berhasil.

Maka gambaran capaian predikat nilai IKU Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024, *rata-rata pada predikat nilai capaian **Cukup berhasil, berhasil dan Sangat Berhasil***, secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Strategis Tahun 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	CAPAIAN	<550	55-70	70-85	85-100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Fasilitasi Penyusunan Angka Inflasi	Tersedianya Angka Inflasi setiap bulan dan Laporan Angka Inflasi Tahunan (Jumlah Dokumen yang dihasilkan)	12 Dokumen	12 Dokumen				√
2.	Terwujudnya Fasilitasi Pembinaan, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Pembinaan, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan) Peningkatan Percepatan Penyerapan Dana KUR dan Peningkatan SDM (Jumlah kegiatan yang dilaksanakan) dan tersusunnya Laporan Kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	13 Laporan	13 Laporan				√
3.	Terwujudnya Koordinasi dan Monitoring Stabilitas Harga Bahan Pokok, dan Bahan Strategis Lainnya	TPID (Jumlah Laporan Stabilitas Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis lainnya)	12 Laporan	12 Laporan				√
4.	Terwujudnya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi dan LPG	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi dan LPG (Jumlah Laporan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi dan LPG)	4 Laporan	4 Laporan				√
5.	Terwujudnya pengendalian tingkat inflasi	TPID Jumlah Laporan Pengendalian inflasi daerah yang dilaporkan	4 Laporan	4 Laporan				√

6.	Pelaksanaan Sosialisasi KUR	Peningkatan Percepatan Penyerapan Dana KUR dan Peningkatan SDM (Jumlah kegiatan yang dilaksanakan)	1 Kegiatan	1 Kegiatan				√
7.	Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian BUMD	Terwujudnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian BUMD (Jumlah BUMD)	4 Dokumen	4 Dokumen				√

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	REALISASI KINERJA 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.		Fasilitasi Penyusunan Angka Inflasi	Tersedianya Angka Inflasi setiap bulan dan Laporan Angka Inflasi Tahunan (Jumlah Dokumen yang dihasilkan)	12 Dokumen
2.		Terwujudnya Fasilitasi Pembinaan, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Pembinaan, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan) Peningkatan Percepatan Penyerapan Dana KUR dan Peningkatan SDM (Jumlah kegiatan yang dilaksanakan) dan tersusunnya Laporan Kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	13 Laporan
3.		Terwujudnya Koordinasi dan Monitoring Stabilitas Harga Bahan Pokok, dan Bahan Strategis Lainnya	TPID (Jumlah Laporan Stabilitas Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis lainnya)	12 Laporan
4.		Terwujudnya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi dan LPG	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi dan LPG (Jumlah Laporan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi dan LPG)	4 Laporan
5.		Terwujudnya pengendalian tingkat inflasi	TPID Jumlah Laporan Pengendalian inflasi daerah yang dilaporkan	4 Laporan
6.		Pelaksanaan Sosialisasi KUR	Peningkatan Percepatan Penyerapan Dana KUR dan Peningkatan SDM (Jumlah kegiatan yang dilaksanakan)	1 Kegiatan
7.		Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian BUMD	Terwujudnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian BUMD (Jumlah BUMD)	4 Dokumen

**Tabel 3.4**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Bagian Perekonomian Setda Kab. Banggai Kepulauan**  
**Tahun 2024**

NO	SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2023	TAHUN 2024			Kategori
					TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Fasilitasi Penyusunan Angka Inflasi	Tersedianya Angka Inflasi setiap bulan dan Laporan Angka Inflasi Tahunan (Jumlah Dokumen yang dihasilkan)	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	
2.	Terwujudnya Fasilitasi Pembinaan, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Pembinaan, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan) Peningkatan Percepatan Penyerapan Dana KUR dan Peningkatan SDM (Jumlah kegiatan yang dilaksanakan) dan tersusunnya Laporan Kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100%	
3.	Terwujudnya Koordinasi dan Monitoring Stabilitas Harga Bahan Pokok, dan Bahan Strategis Lainnya	TPID (Jumlah Laporan Stabilitas Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis lainnya)	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	

4.	Terwujudnya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi dan LPG	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi dan LPG (Jumlah Laporan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi dan LPG)	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	
5.	Terwujudnya pengendalian tingkat inflasi	TPID Jumlah Laporan Pengendalian inflasi daerah yang dilaporkan	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	
6.	Pelaksanaan Sosialisasi KUR	Peningkatan Percepatan Penyerapan Dana KUR dan Peningkatan SDM (Jumlah kegiatan yang dilaksanakan)	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	
7.	Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian BUMD	Terwujudnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian BUMD (Jumlah BUMD)	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Tahun 2024 dengan Target Akhir RPD**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Kondisi Akhir RPD Tahun 2025	Capaian Tahun 2024 dengan Target 5 Tahunan
1	2	3	4	5	6
1.	Fasilitasi Penyusunan Angka Inflasi	Tersedianya Angka Inflasi setiap bulan dan Laporan Angka Inflasi Tahunan (Jumlah Dokumen yang dihasilkan)	Dokumen	12 Dokumen	60 Dokumen
2.	Terwujudnya Fasilitasi Pembinaan, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Pembinaan, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan) Peningkatan Percepatan Penyerapan Dana KUR dan Peningkatan SDM (Jumlah kegiatan yang dilaksanakan) dan tersusunnya Laporan Kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	Laporan	13 laporan	65 Laporan
3.	Terwujudnya Koordinasi dan Monitoring Stabilitas Harga Bahan Pokok, dan Bahan Strategis Lainnya	TPID (Jumlah Laporan Stabilitas Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis lainnya)	Laporan	12 Laporan	60 Laporan
4.	Terwujudnya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi dan LPG	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi dan LPG (Jumlah Laporan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi dan LPG)	Laporan	4 Laporan	20 Laporan

5.	Terwujudnya pengendalian tingkat inflasi	TPID Jumlah Laporan Pengendalian inflasi daerah yang dilaporkan	Laporan	4 Laporan	20 Laporan
6.	Pelaksanaan Sosialisasi KUR	Peningkatan Percepatan Penyerapan Dana KUR dan Peningkatan SDM (Jumlah kegiatan yang dilaksanakan)	Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan
7.	Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian BUMD	Terwujudnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian BUMD (Jumlah BUMD)	4 Dokumen	4 Dokumen	20 Dokumen

### 3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang di maksudkan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara capaian target kinerja tahun 2024 dengan realisasi anggaran tahun 2024. Sejauh mana realisasi penggunaan anggaran yang digunakan dalam upaya mencapai target kinerja yang diinginkan Tahun 2024. Secara garis besar bahwa capaian target kinerja Tahun 2024 dengan capaian sebesar 99,56 %, realisasi anggaran tahun 2024.

Untuk 2 program dan 6 kegiatan dan 15 Sub. Kegiatan sebesar Rp. **1.140.000.000,-** dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. **1.134.958.075** atau (99,56%) dari target belanja langsung DAU Bagian Perekonomian sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Tahun Anggaran 2024. Dan yang menunjang pencapaian kinerja adalah Program Perekonomian dan Pembangunan dengan Anggaran sejumlah Rp. **685.144.700,-** (*Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

Rincian realisasi penggunaan anggaran tahun 2024 dengan realisasi capaian target kinerja Tahun 2024 pada tabel berikut:

Tabel 3.6

## Perbandingan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2024 dengan Realisasi Capaian Target Kinerja Tahun 2024

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Fasilitasi Penyusunan Angka Inflasi	Tersedianya Angka Inflasi setiap bulan dan Laporan Angka Inflasi Tahunan (Jumlah Dokumen yang dihasilkan)	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	88.200.000	87.600.000	99,32%
2.	Terwujudnya Fasilitasi Pembinaan, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Pembinaan, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan) Peningkatan Percepatan Penyerapan Dana KUR dan Peningkatan SDM (Jumlah kegiatan yang dilaksanakan) dan tersusunnya Laporan Kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	13 Laporan	13 Laporan	100%	16.873.400	16.397.200	97.18%
3.	Terwujudnya Koordinasi dan Monitoring Stabilitas Harga Bahan Pokok, dan Bahan Strategis Lainnya	TPID (Jumlah Laporan Stabilitas Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis lainnya)	12 Laporan	12 Laporan	100%	122.760.000	120.690.000	98,31%
4.	Terwujudnya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi dan LPG	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi dan LPG (Jumlah Laporan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi dan LPG)	4 Laporan	4 Laporan	100%	206.509.600	206.486.300	99,99%

5.	Terwujudnya pengendalian tingkat inflasi	TPID Jumlah Laporan Pengendalian inflasi daerah yang dilaporkan	4 Laporan	4 Laporan	100%	144.084.000	143.888.900	100%
6.	Pelaksanaan Sosialisasi KUR	Peningkatan Percepatan Penyerapan Dana KUR dan Peningkatan SDM (Jumlah kegiatan yang dilaksanakan)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0%	39.269.200	39.204.600	99,84%
7.	Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian BUMD	Terwujudnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian BUMD (Jumlah BUMD)	4 Dokumen	4 Dokumen	0%	67.448.500	66.448.500	98,52%
<b>Jumlah</b>						<b>685.144.700</b>	<b>680.715.500</b>	<b>99,35%</b>

Salakan, Februari 2025  
 Kepala Bagian Perekonomian Setda  
 Kabupaten Banggai Kepulauan



*Paisal Pahil Muhammad*  
**PAISAL PAHIL MUHAMMAD, S.Sos**  
 NIP. 19750325 20052 1 004

## Program dan Kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Adapun program dan kegiatan tahun 2024, sesuai dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA OPD) tahun anggaran 2024, Bagian Perekonomian Setda Kab.Banggai Kepulauan, Program dan Kegiatan sebagai berikut :

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran tersebut adalah/sebagai berikut :

- **Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dana yang digunakan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan ini sebesar Rp. **454.855.300** dari Rp. **454.242.575** yang dianggarkan tahun 2024 atau terserap 99,87 %.

### 2. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran tersebut adalah / sebagai berikut :

- **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**
  - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
  - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
  - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
- **Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Dana yang digunakan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan ini sebesar Rp. **685.144.700** dari Rp. **680.715.500** yang dianggarkan Tahun 2024 atau terserap 99,35 %.

### 3.4 REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban adalah laporan keuangan yang berlaku meliputi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang OPD. Sedangkan Instrumen utama akuntabilitas keuangan adalah anggaran pemerintah dan data laporan tahunan yang disusun secara periodik sehingga nampak proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk dipertanggungjawabkan dan pengendaliannya pada berbagai tingkatan operasional dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan ketentuan tersebut, sebagai bentuk pertanggung jawaban Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 1.140.000.000** terealisasi sebesar **Rp. 1.134.958.075** atau **99,56%**.

Capaian Realisasi Anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah(DPPA OPD) tahun anggaran 2024 per program indikator kinerja pada tahun 2024 dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

No	Program	Indikator Kerja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	454.855.300	454.242.575	99,87%
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.164.000	28.157.000	99,98%
		- Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.164.000	28.157.000	99,98%
		- Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.517.300	226.590.000	100%

		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.213.600	111.060.650	99,86%
		- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	972.700	972.700	100%
		- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.000.000	16.000.000	100%
		- Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	10.261.000	10.134.825	98,77%
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.070.000	45.747.000	99,30%
		- <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>231.570.000</b>	<b>181.574.100</b>	<b>100%</b>
		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.480.000	3476.400	99,90%
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228.090.000	176.880.000	99%
		- <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>10.604.000</b>	<b>33.427.600</b>	<b>96%</b>
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.904.000	431.427.000	96%
		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	700.000	2.000.000	100%
02	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>		<b>685.144.700</b>	<b>357.416.899</b>	<b>100%</b>
		- <b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>478.635.100</b>	<b>357.416.899</b>	<b>100%</b>
		- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	67.448.500	66.448.500	98,19%
		- Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	355.044.000	357.416.899	100%
		- Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	56.142.500	55.601800	99,04%
		- <b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>206.509.600</b>	<b>206.486.300</b>	<b>99,99%</b>
		- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	206.509.600	206.486.300	99,99%
<b>Jumlah</b>			<b>1.140.000.000</b>	<b>1.134.958.075</b>	<b>99,56%</b>

## PENUTUP

### Bab IV

#### *Kesimpulan dan Saran*

##### A. KESIMPULAN

Sebagai bagian penutup dari laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, dapat disimpulkan bahwa bagian perekonomian setda telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran dan strategisnya. Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat 2 (Dua) Program dan 6 (Enam) Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari Visi, Misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintah yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Dari uraian dan analisis serta evaluasi atas pencapaian sasaran dengan indikator kinerja utama, tersirat secara jelas bahwa Bagian Perekonomian Kabupaten Banggai Kepulauan telah berusaha mewujudkan capaian kinerja sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan dan bertekad membangun sebuah sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih akuntabel. Hal tersebut tampak jelas dari upaya memperbaiki dokumen perencanaan melalui revisi IKU, Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja dan dokumen lain agar seluruh dokumen perencanaan tersebut selaras dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra bagian perekonomian sekretariat daerah kabupaten banggai kepulauan khususnya untuk tahun anggaran 2024 sebagaimana indikator kinerja utama Rencana Strategis (Renstra) bagian perekonomian, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan, namun demikian segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi kedepannya.

## B. SARAN

Namun demikian harus diakui bahwa dalam rangka perbaikan kinerja kedepan, ada beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian yang lebih serius diantaranya :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dengan berbagai upaya untuk lebih meningkatkan capaian kinerja lebih baik dalam pencapaiannya.
2. Untuk meningkatkan keberhasilan program, cakupan dan kualitas pelayanan serta dalam rangka mengantisipasi segala dampak penyelenggaraan pemerintahan perlu strategi dan inovasi baru dalam mengendalikan dan menghadapi masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan-urusan perlu dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang terkait.
3. Keberhasilan dan berlangsungnya suatu organisasi dengan baik, memerlukan dukungan data yang akurat, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai, tepat waktu penyelesaian dan tepat sasaran pencapaiannya.

Kami mohon bantuan dan saran yang dapat di sajikan untuk mendorong bagi aparatur sipil negara pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan untuk selalu berupaya meningkatkan kinerja sehingga pencapaian tujuan dan sasaran dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

Demikian penyajian laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) kami sampaikan dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab.

Salakan, Februari 2025

**Kepala Bagian Perekonomian  
Setda Kab. Banggai Kepulauan**



**PAISAL PAHIL MUHAMMAD, S.Sos**  
NIP. 19750325 20052 1 004

# L A M P I R A N

Lampiran

**Realisasi Kinerja dan Anggaran Program /Kegiatan  
Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan T.A 2024**

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Anggaran					
			Target (K)	Target (Rp)	Realisasi (K)	Realisasi (Rp)	% (K)	% (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		454,855,300		454,242,575		99.87%
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan</b>	<b>1</b>	<b>28,164,000</b>		<b>28,157,000</b>	<b>0%</b>	<b>99.98%</b>
1	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen yang direncanakan	4	28,164,000	4	28,157,000	100%	99.98%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan</b>	<b>5</b>	<b>184,517,300</b>	<b>5</b>	<b>183,915,175</b>	<b>100%</b>	<b>99.67%</b>
2	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Alat Tulis Kantor yang direncanakan dan Jumlah Peralatan Kantor yang direncanakan	2	111,213,600	2	111,060,650	100%	99.86%
3	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah Barang Rumah tangga yang direncanakan	1	972,700	1	972,700	100%	100.00%
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Bahan logistik kantor yang direncanakan	2	16,000,000	2	16,000,000	100%	100.00%
5	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang diencanakan	2	10,261,000	2	10,134,825	100%	98.77%
6	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Perjalanan Dinas yang direncanakan	10	46,070,000	10	45,747,000	100%	99.30%

	<b>Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan</b>	<b>2</b>	<b>231.570.000</b>	<b>2</b>	<b>231.566.400</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
7	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Materai yang direncanakan	290	3.480.000	290	3.476.400	100%	99,90%
8	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Jasa / kegiatan yang direncanakan	15	228.090.000	15	228.090.000	100%	100,00%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan</b>	<b>2</b>	<b>10.604.000</b>	<b>2</b>	<b>10.604.000</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
9	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/Operasional yang direncanakan	4	9.904.000	4	9.904.000	100%	100,00%
10	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor yang direncanakan	1	700.000	1	700.000	100%	100,00%
2	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	- <b>Tersedianya Perekonomian dan Pembangunan</b>		<b>685.144.700</b>		<b>680.715.500</b>		<b>99,35%</b>
	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan</b>	<b>3</b>	<b>478.635.100</b>	<b>3</b>	<b>474.229.200</b>	<b>100%</b>	<b>99,08%</b>
1	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	- Jumlah Dokumen yang direncanakan	4	67.448.500	4	66.448.500	100%	98,52%
2	- Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	- Jumlah Dokumen yang direncanakan	16	355.044.000	16	352.178.900	100%	99,19%

3	- Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	- Jumlah Dokumen yang direncanakan	4	56.142.600	4	55.601.800	100%	99,04%
	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan</b>	<b>1</b>	<b>206.509.600</b>	<b>1</b>	<b>206.486.300</b>	<b>100%</b>	<b>99,99%</b>
4	- Koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan energi dan Air	- Jumlah Dokumen yang direncanakan	4	206.509.600	4	206.486.300	100%	99,99%
<b>Jumlah</b>				<b>1.140.000.000</b>		<b>1.134.958.075</b>		<b>99,56%</b>

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN  
SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN



**PAISAL PAHIL MUHAMMAD, S.Sos**

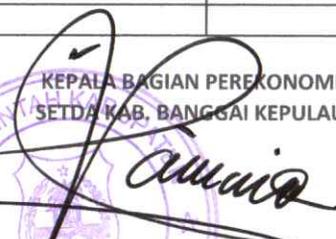
Pembina Tkt.I, IV/b

NIP.19750325 20052 1 004

**REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024**  
**BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH BANGKEP**

NO.		KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023			TARGET	REALISASI PROGRAM/KEGIATAN	KET
			ALOKASI	REALISASI	PERSEN			
			(RP.)	(RP.)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		<b>454.855.300</b>	<b>454.242.575</b>	<b>99,87%</b>			
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>212.681.300</b>	<b>212.072.175</b>	<b>99,71%</b>			
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.164.000	28.157.000	99,98%	4 Dokumen	4 Dokumen	
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.213.600	111.060.650	99,86%	39 Unit	39 Unit	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	972.700	972.700	100,00%	1 Paket	1 Paket	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.000.000	16.000.000	100,00%	2 Paket	2 Paket	
		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.261.000	10.134.825	98,77%	2 Paket	2 Paket	
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.070.000	45.747.000	99,30%	10 Laporan	10 Laporan	
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>231.570.000</b>	<b>231.566.400</b>	<b>100,00%</b>			
		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.480.000	3.476.400	99,90%	290 Lembar	290 Lembar	
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228.090.000	228.090.000	100,00%	15 Laporan	15 Laporan	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>10.604.000</b>	<b>10.604.000</b>				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	9.904.000	9.904.000	100,00%	4 Unit	4 Unit			
- Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	700.000	700.000	100,00%	1 Unit	1 Unit			
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
2	Program Perekonomian dan Pembangunan		<b>685.144.700</b>	<b>680.715.500</b>	<b>99,35%</b>			
		<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>478.635.100</b>	<b>474.229.200</b>	<b>99,08%</b>			
		- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	67.448.500	66.448.500	98,52%	4 Dokumen	4 Dokumen	

	- Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	355.044.000	352.178.900	99,19%	16 Laporan	16 Laporan
	- Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	56.142.600	55.601.800	99,04%	13 Laporan	13 Laporan
	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>206.509.600</b>	<b>206.486.300</b>	<b>99,99%</b>		
	- Koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan energi dan Air	206.509.600	206.486.300	99,99%	4 Dokumen	4 Dokumen
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.140.000.000</b>	<b>1.134.958.075</b>	<b>99,56%</b>		

  
 KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN  
 SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN  
  
**PAISAL PAHIL MUHAMMAD, S.Sos**  
 Pembina Tkt.I, IV/b  
 NIP.19750325 20052 1 004

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	JADWAL				KET
						I	II	III	IV	
1	2	3								
1.	Fasilitasi Penyusunan Angka Inflasi	Tersedianya Angka Inflasi setiap bulan dan Laporan Angka Inflasi Tahunan (Jumlah Dokumen yang dihasilkan)	Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan kebijakan Perekonomian	88.200.000	√	√	√	√	
2.	Terwujudnya Fasilitasi Pembinaan, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Pembinaan, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan) Peningkatan Percepatan Penyerapan Dana KUR dan Peningkatan SDM (Jumlah kegiatan yang dilaksanakan) dan tersusunnya Laporan Kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan kebijakan Perekonomian	16.873.400,00	-	-	√	√	
3.	Terwujudnya Koordinasi dan Monitoring Stabilitas Harga Bahan Pokok, dan Bahan Strategis Lainnya	TPID (Jumlah Laporan Stabilitas Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis lainnya)	Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan kebijakan Perekonomian	122.760.000	√	√	√	√	

4.	Terwujudnya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi dan LPG	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi dan LPG (Jumlah Laporan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM)	Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan kebijakan Perekonomian	206.509.600,00	√	√	√	-	
5.	Terwujudnya pengendalian tingkat inflasi	TPID Jumlah Laporan Pengendalian inflasi daerah yang dilaporkan	Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan kebijakan Perekonomian	144.084.000	√	√	√	√	
6.	Pelaksanaan Sosialisasi KUR	Peningkatan Percepatan Penyerapan Dana KUR dan Peningkatan SDM (Jumlah kegiatan yang dilaksanakan)	Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan kebijakan Perekonomian	39.269.200,00	-	-	√	-	
7.	Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian BUMD	Terwujudnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian BUMD (Jumlah BUMD)	Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan kebijakan Perekonomian	67.448.500,00		√	√	√	

Salakan,

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN  
SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN

*Muhammad*  
PAISAL PAHIL MUHAMMAD, S.Sos

Pembina Tkt.I, IV/b

NIP.19750325 20052 1 004

# PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PAISAL PAHIL MUHAMMAD,S.Sos**  
Jabatan : **Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Pj.IHSAR BASIR**  
Jabatan : **BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salakan, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Pj. Bupati Banggai Kepulauan  
  
( IHSAN BASIR, SH.,LL.M)

Pihak Pertama,  
Kepala Bagian  
  
( **PAISAL PAHIL MUHAMMAD, S.Sos**)  
Pembina Tkt.I, IV/b  
NIP.19750325 200502 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Fasilitasi Penyusunan Angka Inflasi	Tersedianya Angka Inflasi setiap bulan dan Laporan Angka Inflasi Tahunan (Jumlah Dokumen yang dihasilkan)	13 Dokumen
2.	Terwujudnya Fasilitasi Pembinaan, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Pembinaan, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan), Peningkatan Percepatan Penyerapan Dana KUR dan Peningkatan SDM (Jumlah kegiatan yang dilaksanakan) dan tersusunnya Laporan Kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	13 Laporan
3.	Terwujudnya Koordinasi dan Monitoring Stabilitas Harga Bahan Pokok, dan Bahan Strategis Lainnya	TPID (Jumlah Laporan Stabilitas Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis lainnya)	13 Laporan
4.	Terwujudnya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi dan LPG	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi dan LPG (Jumlah Laporan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM	4 Laporan
5.	Terwujudnya pengendalian tingkat inflasi	TPID Jumlah Laporan Pengendalian inflasi daerah yang dilaporkan	4 Laporan
6.	Terwujudnya penguatan TPID Kabupaten	Peningkatan SDM (Jumlah Kegiatan Workshop penguatan Kelembagaan TPID Kabupaten yang dilaksanakan)	1 Kegiatan
7.	Pelaksanaan Sosialisasi KUR	Peningkatan Percepatan Penyerapan Dana KUR dan Peningkatan SDM (Jumlah kegiatan yang dilaksanakan)	1 Kegiatan
8.	Fasilitasi Kebijakan Pendistribusian dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG	Terwujudnya Payung Hukum terkait Penetapan HET LPG	1 Dokumen
9.	Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian BUMD	Terwujudnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian BUMD (Jumlah BUMD)	3 Dokumen
9.	Terlaksananya Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Bagian Perekonomian Setda	Jumlah Dokemnen yang direncanakan dan dihasilkan	5 Dokumen

**Program**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan
- 1 Daerah Kabupaten/Kota
- 2 Program Perekonomian dan Pembangunan

**Anggaran**

Rp. **354,855,300**  
Rp. **685,144,700**

  
 Kepala Bagian Perekonomian  
 Setda Kab. Banggai Kepulauan  
**PAISAL PAHIL MUHAMMAD, S.Sos**

**Pembina Tkt, I, IV/b**  
**NIP.19750325 20052 1 004**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN**  
**SALAKAN**

JL. Bukit Trikora No. Telp. ( 0462 ) ..... Fax. .... Kode Pos 94785

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NURIYANI TANGIDUK, SE**  
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil**

Selanjutnya disebut pihak pertama

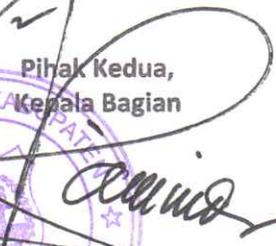
Nama : **PAISAL PAHIL MUHAMMAD, S.Sos**  
Jabatan : **Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah**

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salakan, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Bagian  
  
( **PAISAL PAHIL MUHAMMAD, S.Sos** )  
Pembina Tkt.I, IV/b  
NIP.19750325 20052 1 004

Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bagian

  
( **NURIYANI TANGIDUK, SE** )  
NIP. 19780510 200801 2 014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Fasilitasi Penyusunan Angka Inflasi	- Tersedianya Angka Inflasi setiap bulan dan Laporan Angka Inflasi Tahunan (Jumlah Dokumen yang dihasilkan)	13 Dokumen
2.	Terwujudnya Koordinasi dan Monitoring Stabilitas Harga Bahan Pokok, dan Bahan Strategis Lainnya	- TPID (Jumlah Laporan Stabilitas Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis lainnya)	13 Laporan
3.	Terwujudnya pengendalian tingkat inflasi	- TPID Jumlah Laporan Pengendalian inflasi daerah yang dilaporkan	4 Laporan
4.	Terwujudnya Fasilitasi Pembinaan, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	- Pembinaan, Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan), Peningkatan Percepatan Penyerapan Dana KUR dan Peningkatan SDM (Jumlah kegiatan yang dilaksanakan) dan tersusunnya Laporan Kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	13 Laporan
5.	Terlaksananya Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Bagian Perekonomian Setda	- Jumlah Dokemnen yang direncanakan dan dihasilkan	5 Dokumen

	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. <b>354,855,300</b>	
2 Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. <b>411,186,600</b>	


  
**Kepala Bagian Perekonomian  
Setda Kab. Banggai Kepulauan**

**PAISAL PAHIL MUHAMMAD, S.Sos**

**Pembina Tkt.I, IV/b  
NIP.19750325 20052 1 004**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN**  
**SALAKAN**

JL. Bukit Trikora No. Telp. ( 0462 ) ..... Fax. .... Kode Pos 94785

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUHARI E. TILAAAR, SH**  
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Pengendalian dan distribusi perekonomian**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **PAISAL PAHIL MUHAMMAD, S.Sos**  
Jabatan : **Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah**

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salakan, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Bagian  
  
( PAISAL PAHIL MUHAMMAD, S.Sos )  
Pembina Tkt.I, IV/b  
NIP.196402061996031003

Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bagian  
  
( BUHARI EDISON TILAAAR, SH )  
NIP. 198104 201001 1 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi dan LPG	- Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi dan LPG (Jumlah Laporan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BBM Bersubsidi dan LPG) dan Terwujudnya Payung Hukum terkait Penetapan HET LPG	4 Laporan

**Program**

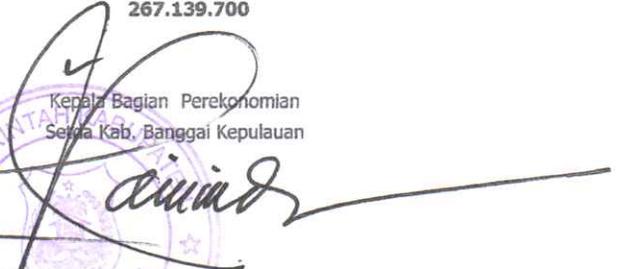
1 Program Perekonomian dan Pembangunan Rp.

**Anggaran**

**267.139.700**

**Keterangan**

Kepala Bagian Perekonomian  
 Setda Kab. Banggai Kepulauan



**PAISAL PAHIL MUHAMMAD, S.Sos**  
 Pembina Tkt.I, IV/b  
 NIP.19750325 20052 1 004





**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN**

Jln. Bukit Trikora Kompleks Perkantoran No. 2 Telp. (0462) Fax.(0462) Salakan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NATHAN FRANS IRING TAPPI,S.E,M.A.P**  
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD & BLUD**

Selanjutnya disebut pihak pertama

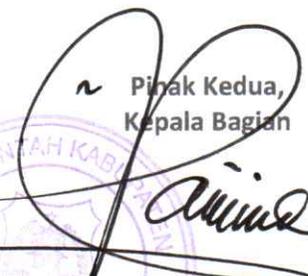
Nama : **PAISAL PAHIL MUHAMMAD, S.Sos**  
Jabatan : **Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah**

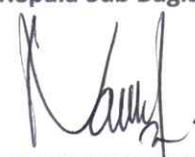
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salakan,

  
Pihak Kedua,  
Kepala Bagian  
  
(**PAISAL PAHIL MUHAMMAD, S.Sos**)  
Pembina Tkt.I, IV/b  
NIP.750325 20052 1 004

Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bagian  
  
( **NATHAN FRANS IRING TAPPI,S.E,M.A.P**)  
NIP. 19840211 201001 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian BUMD	- Terwujudnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian BUMD (Jumlah BUMD)	4 Dokumen

**Program**

1 Program Perekonomian dan Pembangunan Rp.

**Anggaran**

**67.448.500**

**Keterangan**

Kepala Bagian Perekonomian  
Setda Kab. Banggai Kepulauan

**PAISAL PAHIL MUHAMMAD, S.Sos**

Pembina Tkt.I, IV/b

NIP.196750325 20052 1 004